



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) LPMP SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Komplek Perguruan Tinggi Air Tawar Padang
Telepon (0751) 7054302, Fax (0751) 7053302
Website : www.lpmpsumbar.kemdikbud.go.id
Email : lpmp.sumbar@kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan amanat Permendikbud Nomor 15 tahun 2015, dengan menjabarkan tugas pokok dan fungsinya ke dalam suatu rencana strategis (Renstra) yang berpedoman kepada Renstra Ditjen dikdasmen tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra LPMP Sumatera Barat juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan pendidikan serta kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Renstra ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen LPMP sebagai unit pelaksana teknis pemerintah pusat di daerah dalam upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Renstra ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih oprasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Renstra ini juga merupakan alat kendali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP. Renstra ini berisikan visi dan misi LPMP, tujuan strategis, sasaran strategis dan program strategis selama 5 tahun kedepan yang merupakan suatu bahan yang dapat digunakan untuk acuan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan tindak lanjut.

Padang, Desember 2015

Kepala LPMP Sumbar

Drs. Rasoki Lubis, M.Pd

NIP. 196604101991031004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Kondisi Umum.....	3

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS LPMP SUMBAR

A. Visi.....	4
B. Misi.....	4
C. Tujuan Strategis.....	5
D. Sasaran Strategis.....	7

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	12
B. Kerangka Kelembagaan.....	18

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja.....	20
B. Kerangka Pendanaan.....	41

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang harus diselenggarakan oleh setiap jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta. Penjaminan mutu pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan mampu mewujudkan susasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah, dan LPMP Sulawesi Selatan menjelaskan tugas LPMP adalah penjaminan mutu, pengembangan model, dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi. Pelaksanaan tugas tersebut dipertanggungjawabkan langsung kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjendikdasmen).

LPMP Sumatera Barat sebagai unit pelaksana teknis mewujudkan amanat Permendikbud Nomor 15 tahun 2015 tersebut dengan menjabarkan tugas pokok dan fungsinya ke dalam suatu rencana strategis (Renstra) yang berpedoman pada Renstra Ditjendikdasmen tahun 2015-2019. Penyusunan renstra LPMP Sumatera Barat juga berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku tentang pelaksanaan pendidikan serta kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Renstra ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen LPMP sebagai unit pelaksana teknis pemerintah pusat di daerah dalam upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Renstra ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian

sasaran jangka menengah organisasi. Renstra ini juga merupakan alat kendali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP. Renstra ini berisikan visi misi LPMP, tujuan strategis, sasaran strategis dan program strategis selama 5 tahun kedepan yang merupakan suatu bahan yang dapat digunakan untuk acuan pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada peraturan perundangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana Strategis K/L) 2015-2019;

17. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

18. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah, dan LPMP Sulawesi Selatan.

C. Kondisi Umum

Renstra LPMP Sumatera Barat 2015-2019 tidak terlepas dari perjalanan pelaksanaan Renstra LPMP Sumatera Barat periode 2011-2015. Hasil analisis ini digunakan sebagai acuan dalam merumuskan arah kebijakan dan sasaran, indikator kinerja program (IKP), indikator kinerja kegiatan (IKK) serta *output* Renstra LPMP Sumatera Barat 2015-2019.

Tujuan strategis LPMP Sumatera Barat tahun 2011-2015 adalah (1) Terlaksananya pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; (2) Terlaksananya supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; (3) Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; (4) Terlaksananya pengembangan model penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; (5) Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan (6) Terwujudnya tata kelola yang efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN STRATEGIS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT

A. Visi LPMP Provinsi Sumatera Barat

Visi merupakan komponen penting dalam menentukan arah sebuah organisasi. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LPMP Sumatera Barat menyusun visi kelembagaan dengan merujuk kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019, dengan visi **“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**.

Makna ekosistem dan gotong royong dalam konteks ini adalah sekolah yang kondusif, guru sebagai penyemangat, keterlibatan orang tua, kepedulian masyarakat, peran dunia usaha dan industri, kontribusi organisasi profesi dan peran pemerintah. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh berbagai pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong pembangunan pendidikan dan kebudayaan mengandung makna sebagai sebuah gerakan yang menumbuh suburkan ekosistem pendidikan.

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka LPMP Sumatera Barat menetapkan visi **“Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berintegritas”**. Makna berintegritas yang dimaksud dalam visi ini adalah; mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

B. Misi LPMP Sumatera Barat

Dalam rangka mencapai visi ini, maka disusun 7 (tujuh) misi yang diemban oleh LPMP Sumatera Barat, yaitu:

1. Menghasilkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah berbasis data yang integratif (M1);
2. Melaksanakan supervisi mutu pendidikan dasar dan menengah berbasis peta mutu pendidikan (M2);

3. Melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah berbasis peta mutu pendidikan (M3);
4. Melakukan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dalam lingkup nasional dan regional *ASEAN* (M4);
5. Mengembangkan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan dalam lingkup nasional dan regional *ASEAN* (M5);
6. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi (M6);
7. Meningkatkan tata kelola yang berintegritas (M7).

C. Tujuan Strategis LPMP Sumatera Barat

Tujuan strategis LPMP Sumatera Barat tahun 2015-2019 mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan strategis tersebut adalah :

Tabel 2.1 : Tujuan Strategis LPMP Sumatera Barat Tahun 2015-2019

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas peta mutu pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar pengembangan mutu satuan pendidikan
T.2	Penguatan satuan pendidikan dasar dan menengah melalui supervisi mutu pendidikan yang berkualitas
T.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.
T.4	Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagai rujukan di tingkat nasional dan regional
T.5	Pengembangan program kemitraan tingkat nasional dan regional untuk peningkatan penjaminan mutu pendidikan
T.6	Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan yang handal untuk terciptanya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah
T.7	Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel

Tujuan strategis ini bertujuan untuk memenuhi pencapaian visi dan misi LPMP Sumatera Barat, tanpa memandang status sosial ekonomi dan budaya, ras, etnik,

agama, gender, ataupun faktor geografis, serta menganut prinsip pendidikan yang adil dan merata. Penjabaran tujuan tersebut secara rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas peta mutu pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar pengembangan mutu satuan pendidikan

Dalam mengembangkan mutu satuan pendidikan, hal yang diperlukan pertama kali adalah peta mutu. Dalam peta mutu tersebut akan terlihat gambaran nyata mengenai kondisi pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan secara kuantitas adalah semakin banyak dan lengkap data yang diperoleh dalam menjabarkan peta mutu. Sedangkan peningkatan kualitas lebih kepada validitas dan akurasi analisis data tersebut sehingga hasilnya dapat digunakan dalam pengembangan satuan pendidikan.

2. Penguatan satuan pendidikan dasar dan menengah melalui supervisi mutu pendidikan yang berkualitas

Peta mutu pendidikan yang telah dijabarkan secara lengkap dapat dijadikan bahan untuk melakukan supervisi di satuan pendidikan. Apabila melalui suatu analisis yang mendalam dalam membuat rencana supervisi maka akan semakin berkualitas supervisi yang dilakukan.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

Hasil peta mutu juga diperlukan dalam menentukan fasilitasi yang akan dilakukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Keperluan secara kuantitas dan kualitas fasilitasi direncanakan dengan suatu konsep pembelajaran yang efektif sehingga hasil fasilitasi di harapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan.

4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagai rujukan di tingkat nasional dan regional

Pengembangan model merupakan suatu karya inovasi yang dapat dilakukan secara terus menerus yang didasarkan kepada permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan. Permasalahan tersebut dijadikan suatu bahan analisis yang dapat dikembangkan menjadi model penjaminan mutu yang dapat diterapkan secara nasional dan menjadi model juga bagi regional.

5. Pengembangan program kemitraan tingkat nasional dan regional untuk peningkatan penjaminan mutu pendidikan

Selama ini program kemitraan masih banyak didasarkan pada kebutuhan Kab/Kota. Untuk kedepannya dapat dikembangkan kemitraan dalam bentuk penawaran kepada Kab/Kota mengenai model peningkatan mutu pendidikan yang menyeluruh sehingga peningkatan mutu tersebut dapat merata di semua Kab/Kota.

6. Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi mutu pendidikan yang handal untuk terciptanya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah

Pengembangan sistem informasi sangat diperlukan di era digital saat ini. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna informasi untuk mengakses informasi secara *up date* dan pengelolaannya menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas informasi yang ditampilkan.

7. Peningkatan sistim tata kelola yang transparan dan akuntabel

Dibangun suatu sistem tata kelola yang berbasis sistem informasi yang akan memudahkan dalam pengerjaannya dan akuntabilitasnya dapat terjaga.

D. Sasaran Strategis LPMP Sumatera Barat

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran strategis yang harus dicapai sampai tahun 2019 dari setiap tujuan strategis tersebut, sehingga menjadi target yang harus dicapai dalam mendukung suksesnya pembangunan pendidikan dasar dan menengah selama 5 tahun kedepan. Pada setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja program (IKP).

Adapun sasaran strategis LPMP Sumatera Barat tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas peta mutu pendidikan dasar dan menengah untuk pengembangan mutu satuan pendidikan.

Melalui tujuan strategis ini diharapkan LPMP Sumatera Barat dapat mewujudkan ketersediaan peta mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, dan ketersediaan data indeks efektivitas satuan pendidikan dasar dan menengah di

Sumatera Barat. Indikator keberhasilan sasaran program ini adalah mutu 4.057 Sekolah Dasar, 750 Sekolah Menengah Pertama, 292 Sekolah Menengah Atas, 186 Sekolah Menengah Kejuruan dan indeks efektifitas Sekolah Dasar 100%/tahun, Sekolah Menengah Pertama 100%/tahun, Sekolah Menengah Atas 100%/tahun, Sekolah Menengah Kejuruan 100%/tahun.

2. Penguatan satuan pendidikan dasar dan menengah melalui supervisi mutu pendidikan yang berkualitas

Melalui tujuan strategis ini LPMP Sumatera Barat diharapkan dapat melaksanakan supervisi mutu satuan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Indikator keberhasilan sasaran program ini adalah Sekolah Dasar yang telah disupervisi 80%/tahun, Sekolah Menengah Pertama 80%/tahun, Sekolah Menengah Atas 80%/tahun, Sekolah Menengah Kejuruan 80%/tahun.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

Mewujudkan terlaksananya peningkatan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Indikator keberhasilan sasaran program ini adalah; jumlah PTK Sekolah Dasar yang telah difasilitasi sebanyak 42.807 orang, jumlah PTK Sekolah Menengah Pertama yang telah difasilitasi sebanyak 18.948 orang, jumlah PTK Sekolah Menengah Atas yang telah difasilitasi sebanyak 11.676 orang, dan jumlah PTK Sekolah Menengah Kejuruan yang telah difasilitasi sebanyak 7.465 orang.

4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagai rujukan di tingkat nasional dan regional

Mewujudkan tersedianya model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang menjadi rujukan di tingkat nasional dan regional. Adapun indikator keberhasilan sasaran program ini sangat tergantung pada proses dan hasil pengembangan model yang dilaksanakan oleh LPMP Sumatera Barat.

5. Pengembangan program kemitraan tingkat nasional dan regional untuk peningkatan penjaminan mutu pendidikan

Mewujudkan jalinan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan di tingkat nasional dan regional. Adapun indikator keberhasilan sasaran program dapat diukur melalui jumlah satuan pendidikan, Dinas pendidikan kabupaten/Kota, Propinsi, nasional dan institusi lain ditingkat regional *ASEAN* yang telah menjalin kemitraan dengan LPMP Sumatera Barat.

6. Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi mutu pendidikan yang handal untuk terciptanya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah

Terciptanya pengelolaan sistim informasi mutu pendidikan yang *Up To date* handal dan terpercaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Adapun indikator keberhasilan sasaran program ini terletak pada kompetensi sumber daya manusia, serta infra struktur pendukung, dan regulasi yang jelas.

7. Penguatan sistim tata kelola yang transparan dan akuntabel

Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; mewujudkan birokrasi LPMP Sumatera Barat yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. Selanjutnya *Performace* atau kinerja pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola yang diinginkan tersebut. Selain perlunya kinerja yang baik, maka ketercapaian tujuan strategis ini harus didukung oleh; 1) tersedianya data pendidikan dasar dan menengah yang akurat, berkelanjutan dan terbaru, 2) nilai minimal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Sumatera Barat sebesar 80 (sangat baik) pada tahun 2015-2019.

Tabel berikut ini menunjukkan kaitan antara tujuan strategis, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program (IKP). Melalui tabel tersebut terlihat jenis IKP sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan.

**Tabel 2.2 : Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Program LPMP Sumatera Barat
Tahun 2015-2019**

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	IKP
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas peta mutu pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar pengembangan mutu satuan pendidikan	a. Tersediannya peta mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, dan b. Tersediaan data indeks efektivitas satuan pendidikan dasar dan menengah	a. Peta mutu 4.057 SD, 750 SMP, 292 SMA, 186 SMK. b. indeks efektifitas SD 100%/tahun, SMP 100%/tahun, SMA 100%/tahun, SMK 100%/tahun.
2	Penguatan satuan pendidikan dasar dan menengah melalui supervisi mutu pendidikan yang berkualitas	Terlaksananya supervisi mutu satuan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	SD disupervisi 80%/tahun, SMP 80%/tahun, SMA 80%/tahun, SMK 80%/tahun
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah	Terlaksananya peningkatan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	jumlah PTK SD yang telah difasilitasi sebanyak 42.807 orang, jumlah PTK SMP yang telah difasilitasi sebanyak 18.498 orang, jumlah PTK SMA yang telah difasilitasi sebanyak 11.676 orang, dan jumlah PTK SMK yang telah difasilitasi sebanyak 7.465 orang.
4	Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagai rujukan di tingkat nasional dan regional	Tersedianya model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang menjadi rujukan di tingkat nasional dan regional	Proses dan hasil pengembangan model yang dilaksanakan
5	Pengembangan program kemitraan tingkat nasional dan regional untuk peningkatan penjaminan mutu pendidikan	Terjalinnnya kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan di tingkat nasional dan regional	Jumlah satuan pendidikan, Dinas pendidikan kabupaten/Kota, Propinsi , nasional dan institusi lain ditingkat regional ASEAN

6	Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi mutu pendidikan yang handal untuk terciptanya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah	Terkelolanya sistim informasi mutu pendidikan yang <i>Up To date</i> handal dan terpercaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah	Sumber daya manusia, serta infra struktur pendukung, dan regulasi
7	Penguatan sistim tata kelola yang transparan dan akuntabel	Terlaksananya sistem tata kelola yang baik	SDM, administrasi, keuangan, BMN dan lingkungan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas iptek dan manusia yang diukur dengan tingkat pendidikan. Situasi perekonomian Indonesia didorong untuk bertransformasi dari ekonomi yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai barang mentah, tenaga kerja murah dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan kualitas iptek yang relatif rendah menjadi perekonomian yang memperoleh nilai tambah tinggi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, industri pengolahan, dan jasa yang didukung oleh manusia yang berkualitas, dan mempunyai daya saing serta didukung kualitas iptek yang terus meningkat.

Beberapa prioritas pembangunan pendidikan nasional mencakup: (1) peningkatan akses pendidikan guna mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, serta meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; (2) peningkatan mutu pendidikan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Hal ini berkaitan dengan peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik; (3) menciptakan tata kelola guna mewujudkan birokrasi yang efektif yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi LPMP Sumatera Barat mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP Sumatera Barat melaksanakan tugas penjaminan mutu, pengembangan model, dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan

dasar dan pendidikan menengah diprovinsi, serta melaksanakan fungsi: (a) pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (b) supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; (c) fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional; (d) pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional; (e) pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional; (f) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan (g) pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Berpedoman pada tupoksi di atas, LPMP Sumatera Barat menentukan arah kebijakan sesuai dengan bidang yang dibawahinya yaitu Bagian Umum, Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan, Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel berikut menunjukkan keterkaitan antara arah kebijakan dengan strategi LPMP Sumatera Barat.

Tabel 3.1.: Core Program LPMP Sumatera Barat

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan kualitas pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah	1. Memetakan mutu pendidikan dasar dan menengah	Penyusunan instrumen pemetaan mutu pendidikan
		Uji coba instrumen pemetaan mutu pendidikan
		CB petugas pemetaan mutu pendidikan
		Pengumpulan data pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah
		Verifikasi dan validasi data hasil pemetaan mutu pendidikan
		Pengolahan dan analisis data hasil pemetaan mutu pendidikan
		Penyusunan rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan
		Diseminasi rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan
		Evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah
		Tersedianya peta mutu pendidikan dasar dan menengah
Optimalisasi pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah	2. Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan	Peningkatan kapasitas internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan supervisi satuan pendidikan.
		Pemberian layanan supervisi satuan pendidikan berdasarkan hasil pemetaan.
		Peningkatan sistem layanan supervisi mutu

dalam penjaminan mutu pendidikan		satuan pendidikan.
		Evaluasi terhadap pelayanan supervisi mutu satuan pendidikan
Peningkatan fasilitasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional	3. Memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional	Penguatan sistem fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional
		Peningkatan kapasitas internal dalam pelaksanaan layanan fasilitas mutu pendidikan.
		Pemberian layanan fasilitas mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan
		Peningkatan sistem layanan fasilitasi mutu pendidikan.
		Evaluasi terhadap pelayanan fasilitasi mutu pendidikan
Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional	4. Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional	Analisis kebutuhan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah berdasarkan peta mutu
		Perancangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Penyusunan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Pengujian model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Perbaikan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah hasil pengujian
		Penggunaan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah terhadap <i>stakeholder</i> terkait
		Evaluasi penggunaan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka perbaikan, peningkatan, dan atau pengembangan
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah	5. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Observasi, wawancara dan studi dokumen informasi mutu pendidikan
		Identifikasi masalah sistem informasi mutu pendidikan
		Analisis sistem informasi mutu pendidikan yang sudah ada
		Rancangan sistem informasi mutu pendidikan
		Penentuan spesifikasi pendukung sistem informasi mutu pendidikan (<i>hardware dan software</i>)
		Pembuatan sistem informasi mutu pendidikan
		Pengujian sistem informasi mutu pendidikan
		Penggunaan aplikasi sistem informasi mutu pendidikan
Evaluasi penggunaan sistem informasi mutu pendidikan		

	6. Mengelola sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Identifikasi sistem informasi mutu pendidikan yang sudah ada
		Penguatan kompetensi pengelola/SDM sistem informasi mutu pendidikan
		Evaluasi pelaksanaan pengelola sistem informasi mutu pendidikan
Peningkatan layanan dan pelaksanaan urusan administrasi LPMP	7. Melaksanakan layanan dan urusan administrasi LPMP	Penguatan kapasitas lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penjaminan mutu pendidikan
		Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi lembaga yang transparan dan akuntabel
		Penguatan sistem penggunaan dan laporan pertanggungjawaban anggaran
		Penguatan sistem pemberian layanan internal
		Penguatan sistem informasi, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset lembaga

Tabel 3.2.: *Extended Program LPMP Sumatera Barat*

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Optimalisasi Implementasi Kurikulum 2013	Penguatan Implementasi Kurikulum 2013	Penyiapan layanan pelatihan Kurikulum 2013 bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
		Pelaksanaan pelatihan Kurikulum 2013 bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
		Pelaksanaan pelatihan pendampingan Kurikulum 2013
		Pelaksanaan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di satuan pendidikan.
		Pelaksanaan monitoring implementasi Kurikulum 2013 di satuan pendidikan
		Evaluasi pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013.
		Tindak lanjut hasil pelaporan hasil monitoring dan evaluasi
		Pelaporan pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013
Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Mewujudkan sekolah garis depan	Penetapan kriteria sekolah garis depan berdasarkan kriteria Ditjen Dikdasmen
		Pembinaan sekolah garis depan bersama pemerintah daerah
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah garis depan
	Membina sekolah inklusi	Pembinaan sekolah inklusi bersama pemerintah daerah
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah inklusi
		Pengimbasan sekolah inklusi ke sekolah terdekat
	Membina Sekolah Luar Biasa	Pembinaan Sekolah Luar Biasa bersama pemerintah daerah

		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Sekolah Luar Biasa
Penumbuhan Budi Pekerti (PBP)	Penguatan terhadap satuan pendidikan dalam menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti	Penguatan implementasi program terhadap satuan pendidikan dalam nilai-nilai budi pekerti
		Pendampingan pada satuan pendidikan dalam menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti
		Evaluasi pelaksanaan terhadap implementasi program terhadap satuan pendidikan dalam nilai-nilai budi pekerti
Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional	Mengembangkan dan melaksanakan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional	Perancangan desain model kemitraan berdasarkan peta mutu pendidikan
		Penyusunan model kemitraan di Bidang Pemetaan Mutu Pendidikan
		Penyusunan model kemitraan di Bidang Supervisi Mutu Pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah
		Penyusunan model kemitraan di Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
		Pelaksanaan kemitraan di Bidang Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
		Pelaksanaan kemitraan di Bidang Supervisi Mutu Pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah
		Pelaksanaan kemitraan di Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
		Evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan dengan <i>stakeholder</i>
Pengembangan Sekolah Model, Sekolah Rujukan, dan Sekolah Binaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Pengembangan Sekolah Model	Perancangan program sekolah model pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Penyeleksian sekolah model pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		CB program sekolah model pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Pendampingan sekolah model pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Evaluasi program sekolah model pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka perbaikan, peningkatan, dan atau pengembangan
	Pengembangan Sekolah Rujukan	Perancangan program sekolah rujukan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Penyeleksian sekolah rujukan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		CB program sekolah rujukan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Pendampingan sekolah rujukan pendidikan dasar dan pendidikan menengah

		Evaluasi program sekolah rujukan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka perbaikan, peningkatan, dan atau pengembangan
	Pengembangan Sekolah Binaan	Perancangan program sekolah binaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Penyeleksian sekolah binaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		CB program sekolah binaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Pendampingan sekolah binaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
		Evaluasi program sekolah binaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka perbaikan, peningkatan, dan atau pengembangan

Tabel 3.3.: Capacity Development LPMP Sumatera Barat

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Pengembangan SDM LPMP Sumatera Barat	Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia LPMP Sumatera Barat	Pemetaan sumber daya manusia LPMP Sumatera Barat
		Perencanaan pengembangan sumber daya manusia LPMP Sumatera Barat
		Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia LPMP Sumatera Barat
		Evaluasi pengembangan sumber daya manusia LPMP Sumatera Barat
		Tindak lanjut pengembangan sumber daya manusia LPMP Sumatera Barat
Pengembangan fasilitas penjaminan mutu	Peningkatan infra struktur dan layanan fasilitas penjaminan mutu	Perencanaan peningkatan infra struktur dan layanan fasilitas penjaminan mutu
		Pengadaan infra struktur penjaminan mutu
		Pemeliharaan infra struktur penjaminan mutu
		Kontrol peningkatan infra struktur dan layanan fasilitas penjaminan mutu
		Pengembangan infra struktur dan layanan fasilitas penjaminan mutu
Pengembangan sistem informasi mutu	Peningkatan tata kelola sistem informasi mutu pendidikan yang akuntabel dan transparan	Perencanaan tata kelola sistem informasi mutu pendidikan
		Pelaksanaan tata kelola sistem informasi mutu pendidikan
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola sistem informasi mutu pendidikan
		Tindak lanjut pelaksanaan tata kelola sistem informasi mutu pendidikan

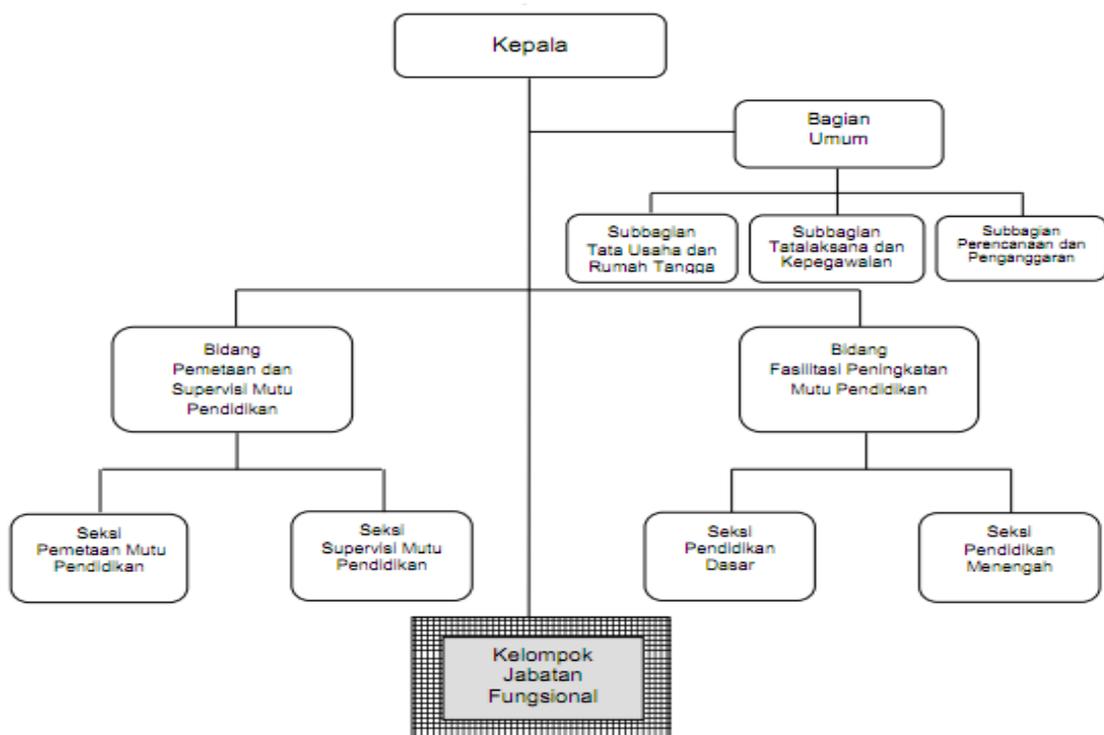
B. Kerangka Kelembagaan LPMP Sumatera Barat

Kerangka kelembagaan LPMP Sumatera Barat meliputi struktur organisasi,

ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain: 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan antar bidang, bagian, dan seksi, serta subbag; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi LPMP Sumatera Barat dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya pendidikan.

Pada periode pembangunan 2015-2019, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Permendikbud No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan.

Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 2015-2019 ditunjukkan pada gambar berikut:



Bagan 3.1.: Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat

Penataan kelembagaan dilakukan dengan koordinasi yang intensif dan efektif di antara berbagai instansi yang terkait dengan penataan kelembagaan LPMP Sumatera

Barat dengan memperhatikan: 1) kebijakan pembangunan; 2) peraturan perundangan yang berlaku, termasuk sejalan dengan kebijakan otonomi daerah; 3) prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern; serta 4) transparansi, efektivitas, dan efisiensi sesuai ketersediaan anggaran lembaga. Dari berbagai upaya tersebut diharapkan dapat terwujud kerangka kelembagaan yang efektif dan akuntabel. Hal tersebut diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model, dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Tugas tersebut dilaksanakan oleh LPMP Sumatera Barat melalui fungsi berikut :

1. Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Supervisi Mutu Pendidikan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan dibidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan tolak ukur untuk melihat keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Target kinerja tersebut tercantum dalam Rencana Strategis LPMP Sumatera Barat tahun 2015-2019 yang dicapai melalui 7 (tujuh) kegiatan pokok, yaitu:

1. Penyediaan peta mutu pendidikan dasar dan menengah;
2. Pelaksanaan supervisi mutu satuan pendidikan dasar dan menengah;
3. Pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
4. Penyediaan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
5. Pengembangan Program kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan yang handal untuk terciptanya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah;
7. Pelaksanaan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Penjabaran rencana kinerja LPMP Sumatera Barat untuk periode 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan peta mutu pendidikan dasar dan menengah

Adapun rencana kinerja dalam rangka penyediaan peta mutu pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2015 sampai 2019 sebagai berikut:

a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah

Pemetaan mutu pendidikan merupakan salah satu bagian kegiatan penjaminan mutu pendidikan untuk mendapatkan peta mutu satuan pendidikan.

Tabel berikut menggambarkan target pemetaan mutu untuk jenjang SD

Tabel 4.1.: Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD yang terpetakan mutu pendidikannya	Persen (%)	100	100	100	100	100

Untuk pencapaian target pemetaan mutu pendidikan jenjang SD 2015-2019 didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.2: Kegiatan Pendukung Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SD yang telah dilatih	Orang	507	507	507	507	507
2	Jumlah SD yang telah dibintek tentang pemetaan mutu pendidikan	Sekolah	4,057	4,057	4,057	4,057	4,057
3	Jumlah Data Mutu Pendidikan jenjang SD yang telah diverifikasi dan divalidasi	Sekolah	4,057	4,057	4,057	4,057	4,057
4	Jumlah Rancangan/desain analisis data mutu pendidikan jenjang SD	Dokumen	1	1	1	1	1
5	Jumlah Data Mutu Pendidikan jenjang SD yang telah diolah dan dianalisis	Dokumen	1	1	1	1	1
6	Jumlah Rekomendasi hasil analisis data mutu pendidikan jenjang SD yang telah disusun	Dokumen	1	1	1	1	1
7	Diseminasi peta mutu pendidikan jenjang SD yang telah dilakukan kepada <i>stake holder</i>	Provinsi	1	1	1	1	1

Target untuk pemetaan mutu pendidikan jenjang SMP 2015-2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3.: Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMP yang terpetakan mutu pendidikannya	Persen (%)	100	100	100	100	100

Untuk pencapaian target pemetaan mutu pendidikan jenjang SMP 2015-2019 didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.: Kegiatan Pendukung Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SMP yang telah dilatih	orang	94	94	94	94	94
2	Jumlah SMP yang telah dibintek tentang pemetaan mutu pendidikan	Sekolah	750	750	750	750	750
3	Jumlah Data Mutu Pendidikan jenjang SMP yang telah diverifikasi dan divalidasi	Sekolah	750	750	750	750	750
4	Jumlah Rancangan/desain analisis data mutu pendidikan jenjang SMP	Dokumen	1	1	1	1	1
5	Jumlah Data Mutu Pendidikan jenjang SMP yang telah diolah dan dianalisis	Dokumen	1	1	1	1	1
6	Jumlah Rekomendasi hasil analisis data mutu pendidikan jenjang SMP yang telah disusun	Dokumen	1	1	1	1	1
7	Diseminasi peta mutu pendidikan jenjang SD yang telah dilakukan kepada <i>stake holder</i>	Provinsi	1	1	1	1	1

Target untuk pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA 2015-2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.5.: Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMA yang terpetakan mutu pendidikannya	Persen (%)	100	100	100	100	100

Untuk pencapaian target pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA 2015-2019 didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.6.: Kegiatan Pendukung Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SMA yang telah dilatih	orang	37	37	37	37	37
2	Jumlah SMA yang telah dibintek tentang pemetaan mutu pendidikan	Sekolah	292	292	292	292	292
3	Jumlah Data Mutu Pendidikan jenjang SMA yang telah diverifikasi dan divalidasi	Sekolah	292	292	292	292	292
4	Jumlah Rancangan/desain analisis data mutu pendidikan jenjang SMA	Dokumen	1	1	1	1	1
5	Jumlah Data Mutu Pendidikan jenjang SMA yang telah diolah dan dianalisis	Dokumen	1	1	1	1	1
6	Jumlah Rekomendasi hasil analisis data mutu pendidikan jenjang SMA yang telah disusun	Dokumen	1	1	1	1	1
7	Diseminasi peta mutu pendidikan jenjang SD yang telah dilakukan kepada <i>stake holder</i>	Provinsi	1	1	1	1	1

Target untuk pemetaan mutu pendidikan jenjang SMK 2015-2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.7.: Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMK yang terpetakan mutu pendidikannya	Persen (%)	65	80	90	100	100

Untuk pencapaian target pemetaan mutu pendidikan jenjang SMK 2015-2019 didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.8.: Kegiatan Pendukung Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengawas dan Petugas Pemetaan Mutu Pendidikan jenjang SMK yang telah dilatih	orang	15	19	21	23	23
2	Jumlah SMK yang telah dibintek tentang pemetaan mutu pendidikan	Sekolah	121	149	167	186	186
3	Jumlah SMK yang Data Mutu Pendidikan telah diverifikasi dan divalidasi	Sekolah	121	149	167	186	186
4	Jumlah Rancangan/desain analisis data mutu pendidikan jenjang SMK	Dokumen	1	1	1	1	1
5	Jumlah Data Mutu Pendidikan jenjang SMK yang telah diverifikasi dan divalidasi	Dokumen	1	1	1	1	1
6	Rekomendasi hasil analisis data mutu pendidikan jenjang SMK yang telah disusun	Dokumen	1	1	1	1	1
7	Diseminasi peta mutu pendidikan jenjang SMK yang telah dilakukan kepada <i>stake holder</i>	Provinsi	1	1	1	1	1

- b. Data indeks efektivitas satuan pendidikan dasar dan menengah yang menggambarkan meningkatnya indek efektivitas SD, SMP, SMA dan SMK hingga tahun 2019 sebesar 100%;

Target untuk data indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang SD 2015-2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.9: Data Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan Jenjang SD 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD yang meningkat indek efektivitasnya	Persen (%)	15	40	75	95	100

Untuk pencapaian target data indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang SD 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.10: Kegiatan Pendukung Data Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan Jenjang SD 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Monitoring dan evaluasi indek efektivitas satuan pendidikan yang sudah difasilitasi dan atau supervisi pada jenjang SD	Persen (%)	15	40	75	95	100

Target untuk data indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang SMP 2015-2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.11: Data Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan Jenjang SMP 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMP yang meningkat indek efektivitasnya	Persen (%)	35	60	80	95	100

Untuk pencapaian target data indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang SMP 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.12: Kegiatan Pendukung Data Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan Jenjang SMP 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Monitoring dan evaluasi indek efektivitas satuan pendidikan yang sudah difasilitasi dan atau supervisi pada jenjang SMP	Persen (%)	35	60	80	95	100

Target untuk data indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang SMA 2015-2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.13: Data Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan Jenjang SMA 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMA yang meningkat indek efektivitasnya	Persen (%)	35	60	80	95	100

Untuk pencapaian target data indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang SMA 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.14: Kegiatan Pendukung Data Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan Jenjang SMA 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Monitoring dan evaluasi indek efektivitas satuan pendidikan yang sudah difasilitasi dan atau supervisi pada jenjang SMA	Persen (%)	35	60	80	95	100

Target untuk data indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang SMK 2015-2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.15: Data Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan Jenjang SMK 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMK yang meningkat indek efektivitasnya	Persen (%)	35	60	80	95	100

Untuk pencapaian target data indeks efektivitas satuan pendidikan jenjang SMK 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.16: Kegiatan Pendukung Data Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan Jenjang SMK 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Monitoring dan evaluasi indek efektivitas satuan pendidikan yang sudah difasilitasi dan atau supervisi pada jenjang SMK	Persen (%)	35	60	80	95	100

2. Pelaksanaan supervisi mutu satuan pendidikan dasar dan menengah

Penguatan satuan pendidikan dasar dan menengah melalui supervisi mutu pendidikan yang berkualitas hingga tahun 2019 diantaranya:

Target untuk penguatan satuan pendidikan pada jenjang SD 2015-2019

Tabel 4.17: Penguatan Satuan Pendidikan Pada Jenjang SD 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah Dasar yang disupervisi mutu pendidikannya	Persen (%)	29.36	40	60	70	80

Untuk pencapaian target penguatan satuan pendidikan pada jenjang SD 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.18: Kegiatan Pendukung Penguatan Satuan Pendidikan Pada Jenjang SD 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD yang telah dilakukan Workshop Pembinaan dalam pengembangan SPMI	Sekolah	1172	1585	2377	2764	3151
2	SD yang telah dilakukan Bimtek ke sekolah yang telah difasilitasi	Sekolah	1172	1585	2377	2764	3151
3	SD Rujukan yang telah dilakukan Workshop Pendampingan	Sekolah	19	38	57	76	95
4	SD Pembina yang telah dilakukan Pendampingan	Sekolah	19	38	57	76	95

Target untuk penguatan satuan pendidikan pada jenjang SMP 2015-2019

Tabel 4.19: Penguatan Satuan Pendidikan Pada Jenjang SMP 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah Menengah Pertama yang disupervisi mutu pendidikannya	Persen (%)	25.07	40	60	70	80

Untuk pencapaian target penguatan satuan pendidikan pada jenjang SMP 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.20: Kegiatan Pendukung Penguatan Satuan Pendidikan Pada Jenjang SMP 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMP yang telah dilakukan Workshop Pembinaan dalam pengembangan SPMI	Sekolah	188	300	450	525	600
2	SMP yang telah dilakukan Bimtek ke sekolah yang telah difasilitasi	Sekolah	188	300	450	525	600

Target untuk penguatan satuan pendidikan pada jenjang SMA 2015-2019

Tabel 4.21: Penguatan Satuan Pendidikan Pada Jenjang SMA 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah Menengah Atas yang disupervisi mutu pendidikannya	Persen (%)	29.31	40	60	70	80

Untuk pencapaian target penguatan satuan pendidikan pada jenjang SMA 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.22: Kegiatan Pendukung Penguatan Satuan Pendidikan Pada Jenjang SMA 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMA yang telah dilakukan Workshop Pembinaan dalam pengembangan SPMI	Sekolah	76	116	174	203	232
2	SMA yang telah dilakukan Bimtek ke sekolah yang telah difasilitasi	Sekolah	76	116	174	203	232
3	SMA yang telah dilakukan Pendampingan dan Pengendali Mutu	Sekolah	76	116	174	203	232
4	SMA Model yang telah dilakukan Bintek	Sekolah	9	18	27	36	45
5	SMA Model yang telah dilakukan Workshop Sekolah Model	Sekolah	9	18	27	36	45

Target untuk penguatan satuan pendidikan pada jenjang SMK 2015-2019

Tabel 4.23: Penguatan Satuan Pendidikan Pada Jenjang SMK 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah Menengah Kejuruan yang disupervisi mutu pendidikannya	Persen (%)	24.86	40	60	70	80

Untuk pencapaian target penguatan satuan pendidikan pada jenjang SMK 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.24: Kegiatan Pendukung Penguatan Satuan Pendidikan Pada Jenjang SMK 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SMK yang telah dilakukan Workshop Pembinaan dalam pengembangan SPMI	Sekolah	46	74	111	130	148
2	SMK yang telah dilakukan Bimtek ke sekolah yang telah difasilitasi	Sekolah	46	74	111	130	148

3. Pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

Fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang dilakukan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat dilihat dari target yang dicapai hingga tahun 2019. Adapun target fasilitasi PTK tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.25: Target Fasilitasi Pendidik dalam rangka penjaminan mutu Dikdasmen 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase jumlah guru yang dilatih kurikulum nasional berdasarkan sekolah pelaksana	Persen (%)	25	50	75	100	100

Untuk pencapaian target fasilitasi pendidik dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tahun 2015-2019 didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.26: Kegiatan Pendukung Fasilitasi Pendidik dalam rangka penjaminan mutu Dikdasmen 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Guru SD yang telah di fasilitasi dalam Pelatihan Kurikulum Nasional	Orang/ Sekolah	10702 /1014	21404 /2029	32105 /3043	42807 /4057	42807 /4057
2	Guru SMP yang telah di fasilitasi dalam Pelatihan Kurikulum Nasional	Orang/ Sekolah	4737 /187	9474 /375	14211 /563	18948 /750	18948 /750
3	Guru SMA yang telah di fasilitasi dalam Pelatihan Kurikulum Nasional	Orang/ Sekolah	2919 /72	5838 /145	8757 /218	11676 /290	11676 /290
4	Guru SMK yang telah di fasilitasi dalam Pelatihan Kurikulum Nasional	Orang/ Sekolah	1866 /46	3733 /93	5599 /139	7465 /185	7465 /185

Tabel 4.27: Target Fasilitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dalam rangka penjaminan mutu Dikdasmen Tahun 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase fasilitasi peningkatan kompetensi PTK berbasis uji kompetensi Guru yang bernilai < 50	Persen (%)	5	15	30	40	50

Untuk pencapaian target fasilitasi pendidik dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tahun 2015-2019 didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.28: Pendukung Fasilitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dalam rangka penjaminan mutu Dikdasmen Tahun 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelatihan bagi Guru SD	Persen (%)	5	15	30	40	50
2	Pelatihan bagi Guru SMP	Persen (%)	5	15	30	40	50
3	Pelatihan bagi Guru SMA	Persen (%)	5	15	30	40	50
4	Pelatihan bagi Guru SMK	Persen (%)	5	15	30	40	50
5	Pelatihan bagi Kepala Sekolah	Persen (%)	5	15	30	40	50
6	Pelatihan bagi Pengawas Sekolah	Persen (%)	5	15	30	40	50

4. Penyediaan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan merupakan salah satu tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Model penjaminan mutu pendidikan yang dikembangkan terdapat pada kegiatan pemetaan, supervisi dan fasilitasi.

a. Pengembangan model pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah

Dalam pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan perlu dikembangkan model yang lebih baik, efektif mudah, baik dari sisi alat/instrumen yang digunakan,

pengolahan data , sehingga hasil analisis dapat melahirkan rekomendasi yang lebih tajam dan fokus.

Target untuk pengembangan model pemetaan mutu pendidikan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.29: Pengembangan Model Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengembangan model pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah	Jenis	1	1	1	1	1

Dalam upaya meningkatkan pengembangan model pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah beberapa kegiatan sebagai pendukungnya antara lain instrumen pemetaan, aplikasi pengolahan, pelaksanaan uji coba dan lain-lain, dengan target seperti tabel berikut :

Tabel 4.30: Pendukung Pengembangan Model Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah instrumen dan aplikasi entry model pemetaan mutu pendidikan	Jenis	1	1	1	1	1
2	Persentase sekolah untuk pelaksanaan uji coba instrumen dan aplikasi entry model pemetaan mutu pendidikan	Persen (%)	30	30	30	30	30
3	Evaluasi dan/atau revisi instrumen dan aplikasi entry model pemetaan mutu pendidikan	Jenis	1	1	1	1	1

b. Pengembangan model supervisi mutu pendidikan dasar dan menengah

Pelaksanaan supervisi terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah yang selama ini telah dilaksanakan lebih banyak hanya melaksanakan sesuai dengan kegiatan dan dana yang tersedia dalam RKAKL setiap tahun anggaran. Selanjutnya pada lima tahun kedepan akan dicoba mengembangkan model supervise satuan pendidikan dengan target seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.31: Pengembangan Model Supervisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengembangan model supervisi mutu pendidikan dasar dan menengah	Jenis	1	2	3	4	5

Dalam pengembangan model supervisi satuan pendidikan perlu dilakukan secara bertahap dengan menetapkan satu sekolah yang dijadikan model pembinaan, yang selanjutnya akan dijadikan model bagi satuan pendidikan lain. Peningkatan jumlah sekolah binaan tersebut akan dilakukan setiap tahun dengan target seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.32: Kegiatan Pendukung Pengembangan Model Supervisi Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan jumlah sekolah binaan	Sekolah	19	38	57	76	95

- c. Pengembangan model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah

Upaya peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pengembangan model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, ditujukan tidak hanya dari sisi pengembangan dari kegiatan yang telah dilakukan selama ini tapi juga dari tingkat akseptabilitas baik oleh lembaga lain maupun lingkup wilayah tingkat nasional ataupun regional . Target yang ingin dicapai dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.33: Pengembangan model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengembangan model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah	Kegiatan	2	4	6	8	10

Beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari pengembangan model

fasilitasi dalam melengkapi usaha peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta tingkat akseptabilitas yang diharapkan adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.34: Kegiatan Pendukung Peningkatan model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan bagi guru	Kegiatan	2	4	6	8	10
2	Model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan bagi kepala sekolah	Kegiatan	1	2	3	4	5
3	Model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan bagi pengawas sekolah	Kegiatan	1	2	3	4	5
4	Peningkatan akseptabilitas model yang dikembangkan	Persen (%)	10	20	30	40	50

5. Pengembangan Program kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah

Terjalannya kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah hingga tahun 2019, meliputi bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan dan bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.

Target tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.35: Program Kemitraan Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kemitraan dalam Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan tingkat lembaga/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional/ Regional	Dokumen	10	20	25	30	35

Untuk pencapaian target program kemitraan pemetaan dan supervisi mutu pendidikan tahun 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.36: Kegiatan Pendukung Program kemitraan Pemetaan dan Supervisi mutu pendidikan tahun 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pemetaan Mutu Pendidikan	Dokumen	1	1	1	1	1
2	Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah Kabupaten/Kota/Provinsi	Dokumen	5	5	5	5	5
3	Seleksi Akademik Calon Pengawas Sekolah di Kabupaten/Kota/Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1
4	Melaksanakan 1 (satu) jenis Jumlah <i>try out</i> untuk memetakan kemampuan siswa sebelum pelaksanaan Ujian Nasional	Jenis	1	1	1	1	1
5	Jumlah Sekolah Binaan di Kabupaten/Kota/Provinsi	Sekolah	7	9	9	9	8
		SD	4	4	4	4	4
		SMP	2	2	2	2	1
		SMA	1	2	2	2	2
		SMK	0	1	1	1	1

Tabel 4.37: Program Kemitraan Fasilitas Pendidikan 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Jumlah Mitra di Tingkat Nasional dan Regional	Dokumen	1	1	1	1	1

Untuk pencapaian target program kemitraan fasilitas pendidikan tahun 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.38: Kegiatan Pendukung Program kemitraan fasilitas pendidik dan tenaga kependidikan 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengembangan Fasilitas bagi pendidik	Layanan	10	10	10	10	10
2	Pengembangan Fasilitas bagi kepala sekolah	Layanan	5	5	5	5	5
3	Pengembangan Fasilitas bagi pengawas sekolah	Layanan	2	2	2	2	2
4	Pengembangan Fasilitas bagi tenaga kependidikan lainnya	Layanan	2	2	2	2	2

6. Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi mutu pendidikan yang handal untuk terciptanya peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah

Terkelolanya sistim informasi mutu pendidikan yang *up to date*, handal dan terpercaya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 4.39: Peningkatan SDM yang Kompeten dalam Pengelolaan Sistem Informasi 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan SDM yang Kompeten dalam Pengelolaan Sistem Informasi	Persen (%)	30	40	60	80	100

Untuk pencapaian target Peningkatan SDM yang Kompeten dalam Pengelolaan Sistem Informasi 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.40. Kegiatan Pendukung Peningkatan Kompetensi SDM Sistem Informasi 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Peningkatan kompetensi tim sistem informasi mutu pendidikan	orang	3	4	6	8	10
2	Sertifikasi profesi tim sistem informasi mutu pendidikan	Jenis	1	2	3	4	5

Tabel 4.41. Pemenuhan Infrastruktur Teknologi Informasi 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pemenuhan infrastruktur Teknologi Informasi dalam hal software	Persen (%)	50	50	50	50	100
2	Penyediaan infrastruktur Teknologi informasi untuk jaringan internet	Persen (%)	80	100	100	100	100

Untuk pencapaian target Pemenuhan Infrastruktur Teknologi Informasi 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.42: Kegiatan Pendukung Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengembangan sistem informasi mutu pendidikan (IT Disaster Recovery Plan) dan GEO Education	Jenis	1	1	1	1	2
2	Jenis media publikasi peta mutu pendidikan	Jenis	2	2	2	2	2
3	Pengembangan bank soal berbasis digital	Jenis	1	1	1	1	1
4	Jaringan internet yang memadai	Persen (%)	80	100	100	100	100
5	Tersedianya perangkat dan jaringan komunikasi internal dan eksternal yang baik	Persen (%)	50	100	100	100	100

Tabel 4.43: Penyediaan regulasi/panduan sistem informasi 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersusunnya Panduan sistem informasi mutu pendidikan	Persen (%)	20	40	60	80	100

Untuk pencapaian target penyediaan panduan sistem informasi 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.44: Kegiatan Pendukung Penyediaan panduan sistem informasi 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Panduan Sistem Informasi Mutu Pendidikan yang telah disusun	Jenis	1	1	1	1	1

7. Pelaksanaan sistim tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Terlaksananya sistim tata kelola yang transparan dan akuntabel ditargetkan hingga tahun 2019 tercapai. Pencapaian target sistem tata kelola dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.45: Meningkatnya kualifikasi Pendidikan SDM LPMP Sumatera Barat 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kualifikasi pendidikan SDM LPMP Sumatera Barat	Persen (%)	100	100	100	100	100

Untuk pencapaian target Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM LPMP Sumatera Barat 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.46: Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM LPMP Sumatera Barat 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Kualifikasi jenjang pendidikan SMP	Orang	2	0	0	0	0
3	Peningkatan Kualifikasi jenjang pendidikan SMA	Orang	0	0	0	2	0
4	Peningkatan Kualifikasi jenjang pendidikan S1	Orang	0	0	1	0	0
5	Peningkatan Kualifikasi jenjang pendidikan S2	Orang	0	0	1	0	0
6	Peningkatan Kualifikasi jenjang pendidikan S3	Orang	0	0	1	0	0

Tabel 4.47: Meningkatnya Kompetensi SDM yang ada di lingkungan LPMP Sumatera Barat 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kompetensi SDM LPMP Sumatera Barat	Orang	60	60	60	60	60

Untuk pencapaian target Peningkatan Kompetensi SDM LPMP Sumatera Barat 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4.48: Kegiatan Pendukung Peningkatan Kompetensi SDM LPMP Sumatera Barat 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kemampuan Berbahasa Asing						
	Bahasa Inggris	Orang	0	15	28.57	28.57	38.10

	Bahasa Jerman	Orang	0	14.3	19.0	28.6	38.1
	Bahasa Jepang	Orang	0	1.0	1.0	28.6	38.1
	Bahasa Mandarin	Orang	0	0	19.0	28.6	38.1
2	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	15.24	19.05	21.90	33.33	44.76
3	Komputer Dasar	Orang	2.9	4.8	9.5	14.3	19.0
4	Komputer Tingkat Lanjut	Orang	4.8	6.7	14.3	19.0	23.8
5	Perhotelan	Orang	4.8	9.5	16.2	19.0	21.0
6	Protokoler	Orang	0.0	1.0	2.9	3.8	4.8
7	Teknisi Air, AC dan Listrik	Orang	1.9	3.8	5.7	7.6	9.5
8	Pengelolaan Keuangan	Orang	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Tabel 4.49: Meningkatnya pengelolaan administrasi dan manajemen lembaga 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya pengelolaan administrasi dan manajemen lembaga	Persen (%)	100	100	100	100	100

Untuk pencapaian target pengelolaan administrasi dan manajemen lembaga 2015-2019 didukung oleh kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel Tabel 4.50: Kegiatan Pendukung Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Lembaga 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Evaluasi pelaksanaan SOP	kegiatan	1	1	1	1	1
2	Evaluasi jabatan dan ABK	kegiatan	1	1	1	1	1

Tabel 4.51: Terlaksananya sistem tata kelola administrasi persuratan LPMP Sumatera Barat 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya sistem tata kelola administrasi persuratan	Persentase (%)	85	100	100	100	100

Pencapaian target terlaksananya sistem tata kelola administrasi persuratan LPMP

Sumatera Barat 2015-2019 terlihat dalam kegiatan dalam tabel berikut:

Tabel 4.52: Kegiatan Pendukung Sistem Tata Kelola Administrasi Persuratan LPMP Sumatera Barat 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengelolaan surat masuk	Persen (%)	85	100	100	100	100
2	Pengelolaan surat keluar	Persen (%)	85	100	100	100	100

Tabel 4.53: Terlaksananya Sistem Tata Kelola Barang Milik Negara yang Transparan dan Akuntabel di LPMP Sumatera Barat 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terlaksananya sistem tata kelola Barang Milik Negara	Persen (%)	90	92	94	96	98

Pencapaian target terlaksananya sistem tata kelola barang milik Negara yang transparan dan akuntabel di LPMP Sumatera Barat 2015-2019 terlihat dalam kegiatan dalam tabel berikut:

Tabel 4.54: Kegiatan Pendukung Sistem tata kelola barang milik Negara yang transparan dan akuntabel di LPMP Sumatera Barat 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pemanfaatan gedung dan fasilitas dengan optimal	Persen (%)	90	92	94	96	98
2	Pengelolaan gedung dan fasilitas perkantoran yang transparan dan akuntabel	Persen (%)	90	92	94	96	98
3	Pengelolaan barang inventaris yang transparan dan akuntabel	Persen (%)	90	92	94	96	98

Tabel 4.55: Nilai LAKIP Tahun 2015-2019

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai Minimal LAKIP LPMP Sumatera Barat	Nilai	73	75	78	80	85

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) diharapkan dapat memberikan informasi faktual mengenai akuntabilitas input, proses, output, outcome sampai dengan benefit dan dampak. Sistem akuntabilitas yang baik dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan dan ketidakberhasilan, efektivitas

suatu program dan kegiatan. Oleh karena itu LAKIP harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai bisnis proses program dan kegiatan di lingkungan LPMP Sumatera Barat. Pengukuran yang dilakukan harus memberikan suatu rekomendasi tentang efektivitas program yang dilakukan dan memastikan bahwa program yang telah dilakukan berdampak pada unit layanan terkecil yaitu stake holder pendidikan. Oleh karena itu LAKIP yang baik dapat disusun bilamana semua program dan kegiatan mengikuti kaidah SAKIP secara konsisten. Untuk mendukung ketercapaian akuntabilitas yang maksimal LPMP Sumbar akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.56: Kegiatan Pendukung Untuk Mencapai Nilai LAKIP Tahun 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Layanan pengendalian internal yang berfungsi dengan baik	Persen (%)	100	100	100	100	100
2	Layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persen (%)	100	100	100	100	100

Tabel 4.57: Penyediaan Infrastruktur Kantor

No	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Infrastruktur Fasilitas Kantor	Persen (%)	42.5	60	81.9	100	100

Pencapaian target penyediaan infrastruktur kantor didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.58: Pendukung Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Kantor

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Saluran air bersih dan air kotor yang memadai	Persen (%)	30	60	100	100	100
2	Jaringan listrik yang telah tertata dengan baik	Persen (%)	25	50	75	100	100
3	Terpenuhinya daya listrik untuk kebutuhan operasional	Persen (%)	30	45	60	100	100
4	Tersedianya bangunan gedung asrama, kelas dan sarana pendukung	Persen (%)	30	30	60	100	100
5	Terwujudnya ruang belajar yang baik dan kondusif	Persen (%)	15	75	100	100	100

6	Tersedianya sarana olah raga (Volley, Senam, Tenis, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Takraw, Futsall, dan Catur) yang memadai	Persen (%)	80	90	100	100	100
7	Tersedianya parkir, taman dan penerangan	Persen (%)	30	30	60	100	100
8	Tersedianya poliklinik yang representative	Persen (%)	100	100	100	100	100

B. KERANGKA PENDANAAN

LPMP Sumatera Barat menyusun rencana strategis tahun 2015-2019 mengacu kepada struktur organisasi dengan formulasi kegiatan dan anggaran sebagai berikut.

Tabel 4.59: Struktur Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	Jumlah Output	Target Anggaran				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat		101M	101,5M	104,5M	107,5M	110,5M
1	Pemetaan Mutu dan Supervisi Mutu Pendidikan	4	6,7 M	15,5 M	15,5 M	16,5 M	17,5 M
2	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	1	22,9 M	30,5 M	32,5 M	33,5 M	34,5 M
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	5	71,5 M	55,5 M	56,5 M	57,5 M	58,5 M

Pelaksanaan program LPMP Sumatera Barat didukung oleh 2 (dua) bidang 1 (satu) bagian sesuai dengan struktur organisasi sebagai unit pelaksana teknis dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Adapun pentahapan pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

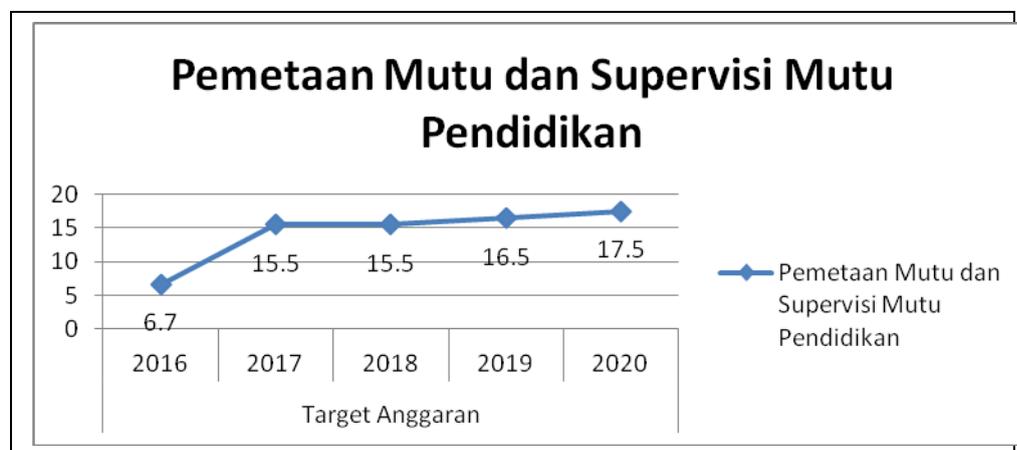
1. Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan

Prioritas bidang pemetaan dan supervisi mutu pendidikan adalah untuk

mewujudkan peta mutu pendidikan dasar dan menengah, sehingga dapat menjadi dasar dalam peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada kabupaten/kota terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan layanan supervisi pendidikan dilakukan untuk memenuhi standar nasional pendidikan di satuan pendidikan. Untuk memenuhi sasaran tersebut LPMP Sumatera Barat telah menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.60: Target Kinerja Kegiatan Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan tahun 2015-2019

No	Output Pendukung	Satuan	Target Sasaran				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	SATUAN PENDIDIKAN YANG TERPETAKAN MUTU PENDIDIKANNYA	Sekolah	5516	5557	6000	6100	6200
2	SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH DIFASILITASI BERDASARKAN 8 SNP	Sekolah	960	1000	1040	1080	1120
3	SEKOLAH MODEL YANG TELAH DIKEMBANGKAN MUTU PENDIDIKANNYA	Sekolah	129	300	400	500	600
4	LAYANAN KEMITRAAN DI BIDANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	Layanan	160	180	200	220	240



Grafik 4.1: Proyeksi Anggaran Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan tahun 2015-2019 (dalam milyar)

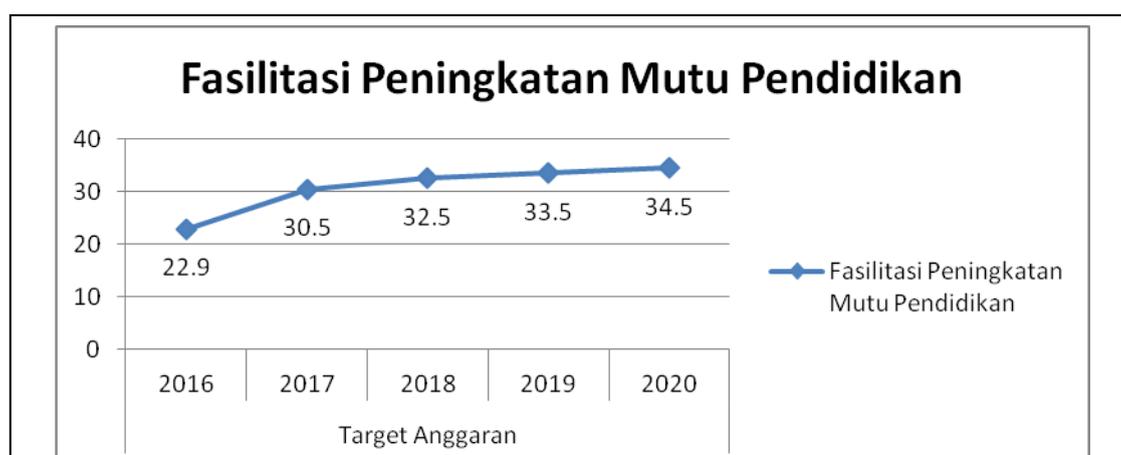
2. Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

Berbagai permasalahan di tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah

antara lain; pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, kerjasama guru, siswa, kepala sekolah, dan pengawas sekolah perlu dibenahi dan ditingkatkan. LPMP Sumatera Barat sebagai lembaga yang berkompeten dalam melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan menuju satuan pendidikan yang kredibel. Upaya yang dilakukan LPMP Sumatera Barat yakni melalui kegiatan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap satuan pendidikan maupun terhadap warga sekolah. Untuk memenuhi sasaran tersebut LPMP Sumatera Barat telah menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.61: Target Kinerja Kegiatan Fasilitasi peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2015-2019

No	Output Pendukung	Satuan	Target Sasaran				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH DIFASILITASI BERDASARKAN 8 SNP	Sekolah	1768	2386	3221	4384	5905



Grafik 4.2: Proyeksi Anggaran Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2015-2019 (dalam milyar)

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya merupakan kegiatan menitikberatkan pada upaya meningkatkan pelayanan publik, mendorong peningkatan mutu satuan pendidikan, mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran lembaga, menjamin akuntabilitas kinerja program dan anggaran lembaga, memperkuat manajemen kinerja aparatur sipil negara. Untuk kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya LPMP Sumatera Barat telah menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan

dan anggaran 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.62: Target Kinerja Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015-2019

No	Output Pendukung	Satuan	Target Sasaran				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	DOKUMEN PERENCANAAN, KEUANGAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN KETATAUSAHAAN	Dokumen	4	4	4	4	4
2	LAYANAN PERKANTORAN	Bulan Layanan	12	12	12	12	12
3	PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	Unit	20	20	20	20	20
4	PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	Unit	120	120	120	120	120
5	GEDUNG/BANGUNAN	M2	9530	4765	4765	4765	2000



Grafik 4.3: Proyeksi Anggaran Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan tahun 2015-2019 (dalam milyar)

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan indikator kinerja program (IKP), yang dirinci dengan pembabakan program dan kegiatan tahunan lembaga yaitu, tahun 2015 sampai 2019. Mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tema pembangunan pendidikan dalam lima tahunan ini adalah meningkatkan daya saing regional, dengan tetap mencari peluang merambah daya saing internasional, yang dilakukan antara lain dengan keikutsertaan peserta didik dari Provinsi Sumatera Barat dalam kompetisi-kompetisi nasional, regional, dan internasional.

Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran program, indikator kinerja program dan kegiatan-kegiatan pendukung yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh LPMP Sumatera Barat pada kurun waktu 2015-2019. Secara operasional program LPMP Sumatera Barat dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan (1) Pemtaan mutu pendidikan dasar dan menengah; (2) Supervisi mutu pendidikan dasar dan menengah; (3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah; (4) Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah; (5) Pengembangan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah; (6) Pengembangan pengelolaan sistim informasi mutu pendidikan dasar dan menengah; (7) Penguatan tata kelola lembaga.

Pembagian kegiatan ini disertai dengan penetapan anggaran dan penanggung jawab pengelolaannya. Seluruh kegiatan LPMP Sumatera Barat harus tetap terarah dan terencana dengan baik. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada indikator kinerja harus tetap mengutamakan efisien dalam pelaksanaannya, serta aspek pengelolaan sumber pembiayaan dan aspek realisasi anggaran.

Indikator kinerja program (IKP) dalam Rencana Strategis menjadi indikasi acuan atau keterukuran keberhasilan kinerja.. Tantangan tetap ada, seperti kualitas sumber daya manusia, percepatan gerak dinamika daerah yang kerap tidak kondusif untuk mendukung pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi tersebut harus disikapi dengan fleksibel dan bijaksana supaya tuntutan dan kebutuhan pendidikan di 19 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat dapat terus disempurnakan.